

## **BAB II**

### **DINAMIKA FEMINISME DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI SWEDIA**

Pada bab ini akan membahas mengenai perkembangan dinamika munculnya feminisme di Swedia. Pada awalnya munculnya feminisme di Swedia dan masih berkembang hingga saat ini akan menggambarkan bahwa Swedia adalah negara yang tidak jauh dari gerakan – gerakan kesetaraan baik gender maupun tingkat sosial. Selain itu, pada bab ini juga akan membahas mengenai kebijakan luar negeri di Swedia dan tekanan dan kerjasama dari negara – negara lain baik negara sesama Nordik maupun luar Nordik. Penulis juga akan membahas mengenai sejarah terbentuknya identitas Nordik, hal ini dirasa perlu karena pada penelitian ini berfokus pada identitas Nordik menjadi faktor Swedia dalam membentuk kebijakan luar negeri, maka perlu adanya penggambaran terbentuknya identitas Nordik itu sendiri.

#### **2.1 Dinamika Feminisme di Swedia**

Munculnya feminisme sendiri, berawal dari gerakan revolusi Perancis yang dimulai pada tahun 1789 (Arivia, 1998). Perkembangan feminisme terbilang sangat lamban dalam studi hubungan internasional. Politik internasional masih disibukkan dan didominasi oleh masalah perang, perebutan kekuasaan dan usaha untuk mencapai damai sehingga para ahli tidak teralihkan pandangannya untuk membahas dan meneliti isu gender dalam hubungan internasional. Feminisme muncul sebagai bentuk pergerakan emansipasi yang menuntut adanya kesetaraan

dan kebebasan yang dianggap tidak adil bagi kaum feminis. Munculnya teori atau perspektif feminisme ini berusaha untuk memperkenalkan gender sebagai variabel yang dapat relevan digunakan untuk memahami konteks – konteks global dan hubungan internasional. Agenda utama dalam perspektif feminisme pada dasarnya menekankan dan menuntut adanya kesetaraan hak, peran dan pendapat wanita yang seharusnya wanita dapat diperhitungkan dalam hubungan internasional (Chodorow, 1995).

Adanya gerakan – gerakan feminisme pada dasarnya bukan merupakan sebuah gerakan untuk balas dendam dengan meruntuhkan eksistensi kaum laki – laki dan perannya dalam tatanan sosial maupun dunia (Hawkesworth, 2006). Namun, munculnya gerakan ini murni untuk mengedepankan aspek kesetaraan peran dan hal wanita untuk dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai kebutuhan manusia yang puncak dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, ideologi, lingkungan, hingga pada aspek politik. Secara lebih jelas, bahwa munculnya pemikiran feminisme ini menyatakan bahwa telah terjadi diskriminasi dan ketidaksamaan hak bagi perempuan yang menimbulkan ketidakadilan karena munculnya konsep objektifitas yang selalu lahir dari pemikiran laki – laki (Chodorow, 1995). Konsep – konsep objektifitas yang dibentuk oleh kaum laki – laki yang kebanyakan standar yang ditetapkan oleh kaum laki – laki tidak dapat mengakomodir upaya pengaktualisasian diri terhadap kaum perempuan. Kaum feminis lebih suka melihat hal tersebut sebagai konsep yang subjektif.

Tatanan dunia kontemporer, melihat bahwa munculnya bias yang ditimbulkan oleh kaum laki – laki mendorong adanya gerakan feminis. Pada dasarnya

perempuan merupakan pemenuhan kebutuhan – kebutuhan dasar yang dapat menopang globalisasi. Perempuan selalu berada dibalik layar kesuksesan laki – laki. Adanya superioritas yang dibentuk oleh laki – laki akhirnya selalu membayangi perempuan di bawah laki – laki. Dalam aspek negara, laki – laki memiliki objektivitas terkait dengan

Munculnya gelombang feminisme pertama kali berkembang hingga ke Swedia. Pada awalnya, gerakan feminisme Swedia masih masif dan hanya kelompok – kelompok tertentu yang berusaha untuk menyuarakan kesetaraan gender. Namun, masuknya gelombang feminisme membawa munculnya gerakan – gerakan feminisme terbesar di Swedia, seperti *The Women's Shelter Movement* yang dimulai sejak 1975 dan masih berkembang hingga saat ini (Lang, 2015). Gerakan feminisme berkembang di Swedia sejalan dengan masuknya gelombang feminisme di Swedia.

Pada gelombang kedua, Swedia banyak menuntut tempat penitipan anak yang layak untuk para perempuan yang sedang bekerja di luar rumah dan tidak sempat untuk menjaga anaknya. Munculnya hak aborsi dan penggunaan kontrasepsi. Menuntut pengakuan diakuinya keberadaan *women's liberation* untuk menjunjung nilai kesetaraan dan penghapusan cluster kelas di dalam masyarakat.

Gelombang ketiga, muncul pada tahun 2000an dimana pada gelombang ini munculnya tuntutan perempuan kepada pemerintah untuk meningkatkan perwakilan perempuan di parlemen. Pada tahun-tahun ini pula, mulai munculnya benih-benih pemerintahan yang feminis di Swedia dengan besarnya desakan pemerintah akan hasil penelitian mengenai feminisme. Pada gelombang ini,

muncul reformasi penting yaitu “*Daddy’s months*” (Lang, 2015) yang memiliki pengertian bahwa suami yang baru memiliki anak juga mendapatkan beberapa bulan cuti kerja agar laki - laki juga memiliki kewajiban yang sama seperti perempuan dalam mengurus anak dan sebagai orang tua. Reformasi lainnya yaitu munculnya konsensus mengenai kesetaraan gender sebagai tujuan politik di parlemen agar kesetaraan gender itu tidak hanya sebagai isu sosial biasa, melainkan sebagai tujuan politik.

Pada akhirnya hingga saat ini Swedia menggunakan kesetaraan gender sebagai tujuan eksplisit politiknya. Kesetaraan gender yang diharapkan oleh pemerintah Swedia disini tidak hanya kesetaraan perwakilan dalam sektor swasta, sektor publik, sipil hingga sektor ekonomi. Swedia adalah negara pertama yang memiliki pemerintahan feminis di dunia (Lang, 2015), yang artinya bahwa kesetaraan gender menjadi pusat prioritas kepentingan pemerintah, baik dalam pembuatan keputusan maupun alokasi sumber daya alam. Pemerintah feminis meyakinkan bahwa perspektif kesetaraan gender akan selalu dibawa dalam pembentukan keputusan atau kebijakan baik nasional maupun internasional. Swedia secara tegas menyatakan dirinya sebagai pemerintahan yang feminis (Sweden Government, 2019), nyatanya sejak diadopsinya resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB, pemerintah Swedia telah aktif bekerja dalam agenda untuk mengangkat isu perempuan, perdamaian dan keamanan dengan diresmikannya Sweden’s Action Plan pada tahun 2006.

## **2.2 Kebijakan Luar Negeri Feminisme Swedia**

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri adalah upaya melalui keseluruhan sikap dan kegiatannya, untuk mengatasi dan memanfaatkan lingkungan eksternal (Rosenau, et al., 1976). Rosenau mengatakan jika melihat politik luar negeri suatu Negara, kita masuk ke dalam fenomena yang kompleks dan luas, termasuk kehidupan di dalam dan di luar Negara. Politik luar negeri suatu Negara pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional rakyat tersebut, sekalipun kepentingan nasional suatu Negara ditentukan oleh penguasa yang sedang berkuasa pada saat itu.

Politik luar negeri digunakan sebagai komitmen mendasar oleh suatu Negara untuk mencapai tujuan tertentu, baik internal maupun eksternal, untuk berpartisipasi aktif dalam urusan internasional. Menurut Breuning, terdapat aspek penting dari kebijakan luar negeri, yaitu: (1) keputusan dibuat sebagai pilihan yang diinginkan suatu Negara, (2) implementasi sebagai bentuk realitas untuk merasionalisasi kebijakan tersebut, (3) hasil menunjukkan bahwa konsekuensi politik luar negeri suatu Negara dapat menciptakan peluang bagi Negara yang bersangkutan atau sebaliknya dapat menjadi Hak Asasi Manusiabtan bagi Negara yang bersangkutan (Breuning, 2007).

Pada tahap analisis kebijakan luar negeri, Breuning menjadi tiga tingkatan analisis, yaitu: (1) pada analisis pertama, tingkat individu berfokus pada bagaimana seorang individu membuat atau mengidentifikasi suatu keputusan, (2) pada analisis tingkat kedua, yang berada di tingkat Negara, yaitu berfokus pada bagaimana Negara itu bertindak atau berperilaku, (3) pada analisis ketiga, ada

derajat sistemasi yang berfokus pada hasil kebijakan luar negeri suatu Negara (Breuning, 2007).

### **2.2.1 Awal Perkembangan Kebijakan Feminisme Swedia**

Tujuan dasar dari kebijakan luar negeri Swedia dikutip dari (Ministry For foreign Affairs Sweden, 2015) oleh Kementrian Luar Negeri Swedia mengatakan, *“Increased global gender equality and strengthened rights and empowerment of women and girl’s by systematically working with a gender perspective within all foreign policy areas”*. Dari pernyataan Kementrian Luar Negeri Swedia, jelas bahwa Swedia akan meningkatkan kesetaraan gender secara global dan memperkuat hak-hak dan pemberdayaan perempuan melalui kerja sistematis dengan menggunakan perspektif gender di semua bidang kebijakan luar negerinya.

Pada mulanya, Swedia setelah pemilu pada tahun 2014 merumuskan kebijakan luar negeri feminis yang membuat kaget masyarakat internasional. Pada tahun tersebut kepemimpinan politik luar negeri dipegang oleh Margot Wallström yang memegang jabatan sebagai menteri luar negeri Swedia.. Sesuai dengan pernyataan Margot Wallström yang di kutip dalam (Ministry For foreign Affairs Sweden, 2015) mengatakan, *“Throughout the world, women are neglected in terms of resources, representation and rights. This is the simple reason why we are pursuing a feminist foreign policy – with full force, all around the world.”* Pernyataan sosok Margot Wallström dilatarbelakangi beliau seorang aktivis yang vokal dalam menyuarakan

keadilan dan kesetaraan gender bahkan melakukan kampanye anti kekerasan seksual.

Kebijakan luar negeri feminis ini muncul ketika dua partai politik memenangkan koalisi pemerintahan pada tahun 2015 yaitu Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau. Pada kebijakan feminisme yang dianut oleh Margot Wallström memegang teguh adanya prinsip kesetaraan dan keikutsertaan wanita dalam segala hal. Fokus utama Margot Wallström terdapat pada tiga pilar utama yaitu Hak (*Rights*), Representasi (*Representation*), dan Sumber daya (*Resources*). Pada pilar pertama, memiliki agar kaum wanita memiliki hak dalam promosi dan advokasi dan melindungi hak – hak wanita dalam urusan bernegara (Ministry For foreign Affairs Sweden, 2015). Pilar kedua, lebih merujuk pada representasi dan keikutsertaan atau partisipasi wanita dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan dalam semua bidang terutama pada bidang perdamaian. Pada pilar ketiga, lebih berfokus pada adanya pemerataan serta keadilan dalam distribusi sumber daya, baik sumber daya alam ataupun pendapatan sebagai bentuk penerapan hak asasi manusia yang adil dalam semua kalangan.

Awal keseriusan Swedia dalam pembentukan kebijakan luar negeri feminisme maka pemerintah Swedia khususnya Kementerian Luar Negeri Swedia membentuk SIDA (*Swedish International Development Cooperation Agency*) dijadikan sebagai badan yang bertanggung jawab dalam implementasi atau penerapan visi dan misi kebijakan femins Swedia. Selain itu, dengan membuat *Handbook Sweden Feminist Foreign Policy* sebagai

sebuah *guide book* Swedia dalam pembuatan kebijakan luar negerinya, dimana dalam handbook tersebut telah merumuskan 6 poin penting Swedia dalam melihat kebijakan luar negeri feminis yaitu :

1. Menerapkan kebijakan feminisme yang berdasar pada pemenuhan Hak Asasi Manusia dimana mengharuskan Negara untuk menerapkan kebijakan diluar teritori wilayah (*full enjoyment of human rights by all woman an girls*).
2. Poin kedua dari kebijakan luar negeri Swedia, yaitu tidak adanya kekerasan fisik, mental dan seksual (*free from psychological and sexual violence*).
3. Partisipasi perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik pada fase pra dan pasca konflik (*participation in preventing and resolving conflict and post conflict building*).
4. Partisipasi politik dan pengaruh perempuan dan anak perempuan di semua sektor masyarakat yang dalam hal ini mendukung partisipasi perempuan (*political participation and influence of women and girls in all areas of society*).
5. Kebijakan luar negeri feminisme Swedia yang kelima adalah memenuhi hak ekonomi dan pemberdayaan (*economic rights and empowerment*).
6. Poin terakhir dari kebijakan luar negeri feminisme yaitu kesehatan dan hak seksual dan reproduksi (*sexual and reproductive health and rights*).

Dalam realisasi pelaksanaan kebijakan luar negeri feminis kepemimpinan Margot Wallström membuat *Swedish Foreign Service Action*

*Plan for Feminist Foreign Policy 2015-2018, including indicative measures for 2018* sebagai bentuk upaya perencanaan implementasi Swedia dalam kebijakan luar negeri feminisnya. Di dalam *action plan* tersebut berusaha untuk memuat 6 tujuan utama dalam *Handbook Sweden Feminist Foreign Policy* dan 3 pilar utama yaitu (*rights, representation, dan resources*).

Swedia menjadi negara pertama yang secara terbuka mengadopsi kebijakan luar negeri feminis yang secara lantang menyatakan “suara terkuat untuk kesetaraan gender dan pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk semua wanita dan anak perempuan” (Lang, 2015). Pada saat yang sama, secara global kebijakan ini dibuat sebagai upaya mempromosikan kesetaraan gender di internasional, yang dapat dilihat perkembangannya dalam beberapa dekade terakhir setelah memakai resolusi Dewan Keamanan PBB 1325. Resolusi tersebut menegaskan bahwa peran penting perempuan dalam pencegahan konflik, negosiasi perdamaian, pembangunan perdamaian, pemeliharaan perdamaian, respon kemanusiaan dan dalam rekonstruksi pasca konflik dan menekankan pentingnya partisipasi yang sama dan keterlibatan penuh mereka dalam semua upaya dalam memelihara dan mempromosikan perdamaian dan keamanan.

Setelah masa kepemimpinan Margot Wallström, tujuan dan impian Swedia dalam mewujudkan kebijakan luar negeri feminis terus berlanjut. Pada masa kepemimpinan politik luar negeri Swedia oleh Ann Linde sebagai Menteri Luar Negeri Swedia tetap melanjutkan cita – cita Swedia tersebut (Sweden Government, 2019). Bentuk perencanaan dan implementasi pada

periode ini dibuktikan dengan Ann Linde membuat *The Swedish Foreign Service Action Plan for Feminist Foreign Policy 2019-2022, including direction and measures for 2020* yang tetap berpegang teguh pada 6 poin utama pada *Handbook Sweden Feminist Foreign Policy* dan 3 pilar utama. Dalam *action plan* ini memiliki fokus pada 3 poin utama yaitu :

- 1) *Promotion of women's and girls economic and social condition*
- 2) *Increased for sexual and reproduction health and rights*
- 3) *Enhanced action on the Women, Peace, and Security Agenda*

Swedia, sebagai Negara yang berkomitmen untuk menerapkan perspektif gender dalam kebijakannya, telah mencapai hasil yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan kesetaraan gender yang ada di Swedia dalam berbagai bidang seperti bidang politik, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan lain-lain. Dengan mencoba menghilangkan stereotip gender di masyarakat melalui kebijakan kesetaraan gender diberbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa hal kebijakan tersebut dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Melihat hasil dan implementasi berkelanjutan dari perspektif gender diberbagai bidang, pemerintah Swedia percaya bahwa ini perlu diterapkan diberbagai Negara untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan gender di dunia. Mengejar ambisi yang ambisius ini, Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom mengumumkan kepada dunia pada Oktober 2015 bahwa Swedia telah mengadopsi kebijakan luar negeri feminisme (Sweden Government, 2019).

Menurut (Government Officer Of Sweden,2015), untuk mendukung sepenuhnya kelangsungan hidup perempuan dalam mencapai perdamaian dan keamanan, Swedia akan membantu dengan berbagai cara. Pertama, membuat perempuan terlihat dan meningkatkan pengaruh serta partisipasi mereka dalam proses membangun dan memelihara perdamaian. Kedua, mengatasi akar penyebab konflik dan kekerasan dengan memungkinkan perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam resolusi konflik. Ketiga, penguatan perlindungan perempuan terhadap segala bentuk kekerasan terkait dan pasca konflik bersenjata. Keempat, penguatan perspektif terkait gender dalam implementasi untuk mencapai perdamaian dan keamanan

Kebijakan luar negeri feminisme Swedia akan membantu mencapai hasil nyata dalam pencapaian kesetaraan gender dan kebebasan penuh dalam realisasi hak asasi manusia bagi semua perempuan di dunia. Dengan ini, kebijakan luar negeri feminis Swedia akan secara sistematis menerapkan perspektif gender berbasis pengetahuan dan analisa di seluruh agenda kebijakan luar negeri, setidaknya dalam upaya perdamaian dan keamanan.

Kebijakan luar negeri feminisme Swedia akan membantu mencapai hasil nyata dalam pencapaian kesetaraan gender dan kebebasan penuh dalam realisasi hak asasi manusia bagi semua perempuan di dunia. Dengan ini, kebijakan luar negeri feminis Swedia akan secara sistematis menerapkan perspektif gender berbasis pengetahuan dan analisa di seluruh agenda kebijakan luar negeri, setidaknya dalam upaya perdamaian dan keamanan.

Kebijakan luar negeri feminis Swedia memiliki fokus yang sangat jelas untuk mendukung perempuan sebagai aktor dalam mencapai perdamaian dan keamanan. Pengaruh dan partisipasi perempuan dalam masalah perdamaian dan keamanan juga menyangkut efektivitas dan Hak Asasi Manusia. *Sweden's National Action Plan* (Rencana Aksi Nasional Swedia) sebagai landasan untuk implementasi resolusi 1325 PBB adalah misi untuk mengubah (Government Officer Of Sweden,2015). *Sweden's National Action Plan* yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 sejak diperkenalkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1352.

Swedia akan mengambil peran kepemimpinan politik yang lebih jelas untuk memajukan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan dan mencapai perubahan nyata dalam kemitraan dengan berbagai kelompok, baik secara nasional maupun global. Swedia akan memastikan bahwa agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan diintegrasikan ke dalam semua tindakan yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan keamanan. Selain itu, laporan tahunan tentang kinerja Swedia untuk perempuan, perdamaian, dan keamanan akan diproduksi.

### **2.2.2 Dinamika Tekanan Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia dalam Hubungannya dengan Negara Lain**

Dalam tujuan pembentukan kebijakan luar negeri Swedia tidak terlepas dari promosi Swedia di dunia internasional sebagai negara pertama dan sering menyuarakan konsep feminisme dan kesetaraan. Untuk mencapai tujuan tersebut Swedia turut aktif dalam merespon isu – isu internasional dengan

tetap mengedepankan aspek feminisme dan kesetaraan. Peran aktif Swedia dilakukan dalam bentuk respon terhadap sebuah kasus ataupun dengan membuat kampanye – kampanye menyuarakan feminisme dan kesetaraan.

Tabel 1. Peran Swedia Dalam Aksi Feminisme Internasional

No.	Program	Tindakan Swedia
1.	Kewajiban pemenuhan hak asasi manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolusi Majelis Umum tentang pernikahan anak, dini dan paksa</li> <li>- Deklarasi dan rencana aksi Konferensi Dunia Empat PPB tentang perempuan di Beijing</li> </ul>
2.	Bebas dari kekerasan fisik, psikis dan seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi didukung dalam masyarakat sipil dan aktor lain berbasis gender</li> <li>- Donor terbesar UN Women dan UN Action Against Sexual Violence in Conflict</li> </ul>
3.	Partisipasi dalam pencegahan dan penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian pasca konflik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontribusi keterlibatan perempuan pada upaya perdamaian di Kolombia, Mali, Suriah, Afghanistan, Myanmar, dan Somalia melalui politik, teknis dan keuangan.</li> <li>- Rencana aksi nasional untuk perempuan, perdamaian dan keamanan di Afghanistan, Bosnia, Irak, Kanada, Myanmar, Sudan dan Republik Ceko.</li> </ul>
4	Partisipasi dan pengaruh politik di semua bidang masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung keterlibatan perempuan Suriah dalam proses politik</li> <li>- Mengambil peran utama dalam International Gender Champions di Jenewa</li> </ul>
5	Hak ekonomi dan pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kampanye He for She tentang menyoroti tanggung jawab laki – laki untuk pekerjaan kesetaraan gender</li> <li>- Berkontribusi pada Uni Eropa dalam perdagangan dengan perspektif kesetaraan gender</li> <li>- Memperkuat peran dan hak perempuan dalam pasar tenaga kerja di Iran, Kamboja, Kroasia, Nigerita, Polandia dan Turki</li> <li>- Mendukung program Organisation for Economic Co-operation and Development Timur Tengah dan Afrika Utara</li> </ul>
6	Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan SheDecides</li> <li>- Menyediakan UNFPA dengan dukungan inti</li> <li>- Memasukkan SRHR dalam pelaporan tahunan rencana aksi Uni Eropa</li> <li>- Memberikan pelatihan bidan di Afghanistan, Myanmar, Sudan dan Zambia</li> <li>- Kampanye Midwives 4all di Uganda</li> </ul>

Pada enam poin diatas, Swedia secara konsisten berkomitmen terhadap promosi – promosi kesetaraan gender. Keenam poin tersebut secara terus menerus dipenuhi oleh Swedia dalam merespon masalah internasional. Kampanye Midwives4all adalah kampanye yang berfokus pada pentingnya bidan dan keselamatan ibu saat melahirkan. Munculnya kampanye ini merupakan bentuk respon Swedia terhadap permasalahan di Uganda. Swedia berharap dengan adanya kampanye ini membuka mata internasional bahwa pentingnya meningkatkan keselamatan ibu saat melahirkan sama dengan menjunjung martabat perempuan sebagai makhluk hidup yang sangat berperan di dalam kehidupan.

Swedia dalam usaha promosi kebijakan luar negeri feminisnya bekerja sama dengan instansi pemerintah. Kementerian Luar Negeri terus melakukan peninjauan terhadap dokumen – dokumen tata kelola untuk memastikan bahwa tata kelola dan pemantauan berjalan dengan baik. Usaha lain Swedia adalah melakukan dialog – dialog dengan berbagai aktor lain. Aktor – aktor tersebut diantaranya masyarakat Swedia, organisasi – organisasi perempuan, pemuda dan hak asasi manusia, komunitas agama, bisnis, organisasi serikat pekerja dan juga para akademisi di tingkat universitas.

Swedia juga melakukan dialog dan kerjasama terkait kesetaraan gender di belahan dunia lainnya. Dialog dan kolaborasi akan berlangsung dengan asosiasi negara bagian dan kawasan. Di antara banyak lainnya, ini termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Uni Afrika (AU), Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Organisasi Kerjasama Islam

(OKI) dan Liga Arab (Ministry For foreign Affairs Sweden, 2015). Para aktor lain juga termasuk Bank Dunia, bank pembangunan regional, Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), Dewan Eropa, Organisasi Perdagangan (WTO), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Dialog Internasional tentang Pembangunan Perdamaian dan Pembangunan Negara (Ministry For foreign Affairs Sweden, 2015).

### **2.2.3 Keikutsertaan Rezim Internasional Menyeruakan Feminisme**

Komitmen – komitmen kesetaraan gender dalam dunia internasional berkembang seiring dengan keikutsertaan rezim – rezim internasional dengan membuat hukum internasional atau perjanjian yang mengikat. Adanya Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta konvensi – konvensi lain seperti :

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
4. Konvensi Hak Anak;
5. Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas;
6. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
7. Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, yang Melengkapi Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional.

Selain munculnya konvensi – konvensi tersebut, adanya Deklarasi dan rencana aksi Konferensi PBB tentang Perempuan di Beijing dan dilanjutkan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, dan resolusi-resolusi selanjutnya.

Pada regional Eropa sendiri membuat Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar, serta Konvensi Dewan Eropa tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (Konvensi Istanbul). Dilanjutkan dengan rencana Aksi Uni Eropa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui hubungan eksternal Uni Eropa 2016–2020, dan Rencana Aksi Uni Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi 2015–2019.

### **2.3 Identitas Negara - Negara Nordik**

Nordik ini terdiri dari tiga negara yang berada di semenanjung Skandinavia yaitu Denmark, Swedia, dan Norwegia dan juga ditambah dua negara Eropa yaitu Islandia dan Finlandia. Berada pada wilayah yang sama membuat negara – negara Nordik ini memiliki banyak kesamaan mulai dengan struktur sosial, cara hidup, agama, bahasa, dan sejarah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya perbedaannya diantara negara - negara Nordik yaitu model ekonomi dan sosial digunakan oleh masing – masing negara. Di dunia

internasional, negara – negara di wilayah Nordik dikatakan sebagai negara maju dikarenakan pendapatan perkapita yang tinggi.

Wilayah negara – negara Nordik memiliki sejarah sama yang dari satu milenium ke masa lalu. Hubungan antara negara – negara Nordik mengalami berbagai dinamika, ada saatnya terjalin hubungan persahabatan namun juga tak jarang muncul berbagai perselisihan. Namun, selama abad terakhir negara – negara Nordik telah mengalami berbagai perubahan dengan intensitas hubungan yang jauh lebih dekat karena adanya pemenuhan hak asasi manusia kesamaan lintas budaya dan telah menerima perbedaan satu sama yang lain.

Sejarah negara - negara Nordik dimulai ketika Lief Erikson yang memiliki julukan “*the Fortune*” berlayar dari pantai Greenland pada tahun 1002 (Greve, 2007). Perjalanan yang dilakukan oleh Lief Erikson tidak pernah terbayangkan bahwa akan mengukir sebuah sejarah. Lief Erikson dapat dikatakan sebagai sebuah simbol wilayah Nordik. Erikson lahir di Islandia yang dibesarkan di Greenland dan menghabiskan masa mudanya di Norwegia, ia telah merasakan hubungan lintas batas sejak jaman Viking. Pada tahun 1003, Lief Erikson dan kapalnya telah mencapai Vinlandia yang akhirnya membuatnya menjadi orang Eropa pertama yang mencapai pantai Amerika sebelum Christopher Columbus.

Selama masa Lief Erikson, sebagian besar wilayah Nordik menjadi kerajaan yang bersatu untuk pertama kalinya yang sejak saat itu disebut sebagai Alam Norwegia “*the Norwegian Realm*” (Greve, 2007). Raja – raja Norwegia secara bertahap menguasai Kepulauan Faroe, Islandia dan Greenland serta melakukan interaksi dengan raja – raja Viking Denmark dan Swedia. Viking Nordik atau

yang diartikan sebagai suku bangsa dari Skandinavia yang berprofesi sebagai pedagang, peladang dan juga perompak. Viking Nordik ini tidak hanya mencapai kawasan Kanada namun juga hingga kota – kota Rusia dan Mediterania. Viking Nordik dikenal sebagai suku bangsa yang digambarkan masyarakatnya haus akan konflik namun suku Viking inilah yang banyak membantu modernisasi Wilayah Nordik lalu dengan diperkenalkannya agama Kristen maka membuat Wilayah Nordik menjadi lebih dekat secara budaya ke Eropa. Munculnya agama Kristen membawa aliran baru ke Wilayah Nordik dibuktikan dengan munculnya bangunan gereja – gereja seperti Katedral di Stavanger dan Ribe, begitu pula biara – biara dan keuskupan sejauh Greenland Barat. Pada wilayah kota, pasar – pasar dan kastil mulai dibangun dan didirikan serta kebiasaan makan dan tren perdagangan mulai berubah berkembang mengikuti Eropa.

Negara – negara Nordik secara umumnya dikenal sebagai negara – negara yang haus akan konflik dan kekuasaan. Kerjasama di negara Nordik hanya berlangsung singkat hingga pada tahun 1512 terjadi konflik perselisihan antara Denmark dengan Norwegia serta Finlandia dengan Swedia hingga memicu pertumpahan darah. Kaum viking di negara Nordik yang mayoritas adalah pedagang dan perompak juga dikenal sebagai masyarakat yang mudah berselisih dan memicu konflik. Namun, seiring masuknya ajaran Lutheran selama abad ke - 16 memberikan banyak perubahan pada sikap dan masyarakat negara Nordik. Pada mulanya negara – negara di kawasan Nordik menganut agama Lutheranisme sebagai agama utama. Lutheranisme sendiri merupakan agama yang mempengaruhi pembentukan identitas negara Nordik. Lutheran membawa ajaran

solidaritas sosial dan saling percaya antar komunitas serta usaha untuk mengharuskan keterlibatan negara dalam kehidupan sosial maupun ekonomi (Nelson, 2017). Dimana diartikan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan diskriminasi baik sosial maupun gender. Pada saat itu negara Nordik yang menganut agama Lutheranisme adalah Kerajaan Denmark – Swedia dan Raja Swedia. Negara Swedia sendiri mengenal arti solidaritas sejak era Viking dimana Swedia memiliki sebutan sebagai negara “Lagom” yang memiliki 2 arti yaitu hukum dan tim. Munculnya istilah lagom ini ditelusuri telah tertanam sebagai saat masyarakat pada era kaum Viking (Greve, 2007). Lagom di Swedia sendiri merupakan pola pikir mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Ini berasal dari tradisi minum alkohol di Swedia, setiap orang aris minum sesuai dengan bagiannya dan tidak berlebihan agar adil bagi orang lain. Adanya nilai – nilai Lutheran membuat secara perlahan istilah lagom di Swedia berubah menjadi keselarasan, kesederhanaan, dan cara untuk memastikan bahwa setiap orang harus diperlakukan adil. Maka, sejak saat itu Lagom memiliki pesona yang melambangkan cara pandang beragama yang lebih moderat (Nelson, 2017).

Selama abad pertengahan posisi wilayah Nordik sebagai entitas yang memiliki kesamaan budaya, ekonomi dan politik telah dikonfirmasi. Pada tahun 1937 antara Denmark, Norwegia dan Swedia bergabung untuk membentuk sebuah Kalmar Union (Persatuan Kalmar) yang merupakan bentuk dari Kerajaan Nordik (Greve, 2007). Adanya persatuan ini terdiri dari dependensi luar negeri Norwegia lama di Shetlands, Kepulauan Orkney, Kepulauan Faroe, Islandia dan Finlandia

dimana persatuan itu berada dibawah kekuasaan Swedia selama abad pertengahan. Peta dari Kalmar Union (Persatuan Kalmar) mirip dengan peta wilayah Nordik yang saat ini telah dikenal.

Persatuan antara negara – negara Nordik dikenal relatif kuat pada tahun awal namun melemah dan terjadi perselisihan internal antara Denmark dengan Norwegia serta Finlandia dengan Swedia. Kalmar Union (Persatuan Kalmar) akhirnya terpecah yang diikuti dengan munculnya banyak kerusuhan hingga pertumpahan darah yaitu pada tahun 1520 ketika Raja Denmark Christian II dan tokoh terkemuka lainnya dieksekusi di ibukota Swedia (Nelson, 2017). Abad pertengahan dan Renaisans dapat dikatakan sebagai periode wilayah Nordik yang tertinggal jauh di belakang Eropa dalam banyak hal. Namun, selama periode yang sama Swedia mengalami banyak perubahan. Swedia menjadi sebuah negara yang berkembang menjadi kekuatan besar Eropa yang telah menguasai sebagian besar Baltik, termasuk bagian Jerman dan Polandia saat ini. Finlandia juga merupakan bagian dari Swedia.

Adanya ambisi negara – negara Nordik ingin berpengaruh di dunia internasional merupakan hal yang sangat sulit. Negara – negara di wilayah Nordik masih berada di bawah bayang – bayang negara – negara kota yang memiliki angkatan laut yang kuat seperti Spanyol, Portugal, Belanda dan Inggris yang memiliki pengaruh sangat besar di pembangunan Eropa. Negara – negara di wilayah Nordik seperti Denmark, Norwegia, Finlandia maupun Swedia tidak akan memiliki peran yang berpengaruh. Namun, negara – negara inilah yang bersatu hingga berani untuk berperang sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan kendali

penuh atas wilayah Nordik yang bersatu. Perang itu akhirnya menguntungkan Swedia, dimana Denmark harus menyerahkan Skane, Halland dan Blekinge untuk berkembang ke Swedia. Pada tahun 1814, dimana seluruh wilayah Norwegia diserahkan ke Swedia (Nelson, 2017).

Swedia dengan Denmark dapat dikatakan tidak memiliki kekuasaan hingga abad kesembilan belas. Namun menurut Eropa, kedua negara kecil itu memiliki potensi untuk dapat membawa perubahan dalam pembangunan Eropa. Denmark dan Swedia dianggap strategis dan menguntungkan. Swedia dan Denmark dianggap dapat menjadi penyangga antara kekuatan besar seperti Rusia, Prusia, Inggris dan Perancis serta dianggap strategis dan menguntungkan karena kepemilikan Laut Baltik tidak kendalikan hanya melalui kekuatan tunggal Swedia (Nordic Cooperation, 2022).

Pada abad kesembilan belas, banyaknya kemiskinan dan rendahnya taraf hidup menjadi sebuah ciri dari permasalahan masyarakat. Banyak orang yang memilih untuk prospek kehidupan yang lebih baik dengan bermigrasi ke Amerika (Nordic Cooperation, 2022). Namun, bagi negara – negara di wilayah Nordik adanya industrialisasi telah menawarkan banyak hal yang baru bagi negara – negara Nordik. Industri berat, pertambangan, dan pembuatan kapal mulai bermunculan di sebagian besar wilayah Nordik. Dengan muncul dan berkembangnya industri – industri ini di kota – kota yang sedang berkembang maka menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, Finlandia, Islandia, dan Norwegia dan Kepulauan Faroe menyuarkan dan memimpikan adanya kemerdekaan, atau setidaknya memiliki

otonomi luas. Pada akhirnya, Norwegia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1905 dan Islandia pada tahun 1918. Finlandia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Rusia pada tahun 1917 tetapi mengalami perang saudara yang pahit di tahun-tahun berikutnya. Jika dilihat sistem pemerintah negara – negara Nordik maka Norwegia memilih untuk menjadi monarki konstitusional seperti Swedia dan Denmark, Finlandia menjadi republik yang kebijakan luar negerinya sebagian besar didasarkan pada hubungan baik dengan Rusia.

Perkembangan industrialisasi memunculkan demokrasi, yang sepenuhnya didirikan di negara-negara Nordik setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Meskipun negara – negara di Wilayah Nordik tetap netral selama Perang Dunia Pertama, namun Denmark dan Norwegia dipaksa ikut campur ke dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1940, Jerman melakukan penyerangan dan menduduki kedua negara. Sebaliknya, Swedia tetap netral sepanjang perang, sementara Finlandia awalnya memihak Jerman. Finlandia menderita kerugian besar dalam pertarungan, pertama melawan Uni Soviet dan kemudian berbalik melawan Jerman. Norwegia juga sangat terpengaruh oleh perang. Islandia, Kepulauan Faroe, dan Greenland berada di bawah kendali Amerika dan Inggris dan tidak memiliki kontak nyata dengan wilayah lain selama perang. Setelah terjadinya perang, pembangunan ekonomi mulai berlangsung di seluruh Wilayah Nordik, dibantu oleh Rencana Marshall AS. Pembangunan ekonomi yang signifikan di negara – negara Nordik membawa pengaruh yang cukup besar di wilayah Eropa. Kebijakan luar negeri Finlandia berusaha untuk menyeimbangkan hubungan dekat dengan Uni Soviet dengan negara - negara Nordik lainnya. Denmark, Islandia,

dan Norwegia bergabung dengan pakta militer Atlantik NATO pada tahun 1949. Sementara sebaliknya, Swedia tetap mempertahankan sikap dan posisi netralitasnya.

Jika dilihat melalui sejarah lahirnya maka negara - negara Nordik mungkin tampak agak terfragmentasi atau terpecah – pecah, namun akan tetapi secara internal ada suara - suara kuat yang mendukung untuk melakukan kerja sama bilateral yang dapat mendekatkan negara - negara tersebut melalui kesamaan secara budaya, ekonomi, dan politik sejauh yang dimungkinkan oleh berbagai kepentingan kebijakan luar negeri. Hal ini menyebabkan pembentukan Dewan Nordik pada tahun 1952 (Nordic Cooperation, 2022). Wilayah Nordik dapat dikatakan sebagai wilayah yang berbeda dari wilayah Eropa yang lain dikarenakan tingkat perpajakannya yang tinggi dengan tujuan untuk kesejahteraan sosial. Dapat dikatakan bahwa, tahun – tahun setelah perang, Nordik berubah menjadi model negara sejahtera yang diperluas lebih lanjut dengan fokus utama memberikan layanan kesehatan dan sistem pendidikan yang modern untuk masyarakatnya.

Kelima negara Nordik yaitu Denmark, Islandia, Norwegia, Finlandia, Swedia, Kepulauan Faroe dan Greenland mengalami peningkatan ekonomi pada paruh kedua abad ke – 20 akibat peningkatan pada sektor ekspor dan ekstraksi bahan – bahan mentah seperti minyak dan gas alam (Nordic Cooperation, 2022). Berkembangnya negara – negara di wilayah Nordik selain karena peningkatan dalam beberapa sektor ekonomi namun juga didorong karena negara – negara tersebut bergabung ke dalam organisasi regional seperti Denmark yang bergabung

dengan Uni Eropa yang diikuti oleh Swedia, Finlandia dan Islandia. Saat ini, wilayah Nordik bersatu tidak hanya memiliki arti sebagai komunitas politik maupun ekonomi namun memiliki arti dan semangat yang lebih luas karena adanya kesamaan bahasa, budaya, bahkan sejarah yang memberikan sebuah identitas sebagai sebuah negara welfare state atau negara kesejahteraan yang berusaha untuk memastikan stabilitas, keamanan dan kemajuan ekonomi untuk wilayah Nordik pada khususnya dan untuk dunia pada umumnya.

Aspek historis, terdapat argumen bahwa Negara Nordik mencapai identitas bersama tersebut karena selama Perang Dingin, negara – negara Nordik memposisikan sebagai *Third Way* atau Jalan Ketiga yang dimaksudkan sebagai jalan tengah antara kapitalisme dengan sosialisme (Stein Kuhnle, 2017). Usai Perang Dingin yang meruntuhkan Uni Soviet mengakibatkan globalisasi berkembang sangat pesat yang menyebabkan Negara Nordik kehilangan jati diri identitasnya. Masyarakat Negara Nordik berusaha untuk menemukan diri mereka kembali dengan melakukan dua proses yang di tempuh. Proses pertama, aktif dalam beradaptasi dengan globalisasi dan struktur ekonomi politik di regional Eropa. Untuk dapat melewati proses tersebut maka Negara Nordik harus menormalisasikan prinsip – prinsip negara sejahtera. Proses kedua, negara – negara Nordik berusaha untuk mengaktifkan kembali identitas kebangsaan *Nordicity* yang salah satunya berusaha menyuarakan aspek – aspek terakit dengan kesetaraan gender. Konsep negara sejahtera ini sudah berakar dan diimplementasikan pada abad ke – 19 yang semakin nampak dijelaskan setelah runtuhnya Uni Soviet (Stein Kuhnle, 2017).

Menurut argumentasi lain, bahwa adanya konsep negara sejahtera atau *welfare state* yang dianut oleh negara Nordik sudah terdapat pada periode Perang Dunia I dan II, dimana negara Nordik sudah memiliki posisi *Third Way* atau Jalan Ketiga ketika terjadi kesepakatan antara buruh dan asosiasi karyawan di Swedia. Dijelaskan lebih lanjut, ketika sebelum Perang Dunia II pecah di Eropa, partai demokrat sosial yang menguasai negara – negara Nordik (Stein Kuhnle, 2017). Hal tersebut mengakibatkan terdapat kesepakatan antar serikat buruh dengan karyawan yang akhirnya menjadi awal dari kerjasama antara organisasi karyawan dengan pemerintah. Melihat pada aspek sejarah tersebut konsep negara sejahtera atau *welfare state* telah menjadi prinsip atau identitas negara Nordik dimana adanya kedekatan antara hubungan pemerintah dengan masyarakat. Adanya kesepakatan dan kerjasama tersebut menjadi sedikit gambaran bahwa konsep negara sejahtera atau *welfare state* sudah menjadi sebuah prinsip yang mendasari dan menjadi identitas bagi negara – negara Nordik untuk menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat